

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi NTT



BPK Memberikan Opini WDP Atas LKPD TA 2015 Pemerintah Kabupaten Sumba Barat

Kupang, Selasa (19 Juli 2016) – Kepala Perwakilan, **Dewi Ciantrini** menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 Kabupaten Sumba Barat kepada Ketua DPRD Kabupaten Sumba Barat, **Gregorius H.B.L Pandango** dan Bupati Sumba Barat, **Agustinus Niga Dapawole** di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dilakukan dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya.

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya perubahan pelaporan keuangan dari Laporan Keuangan berbasis *Cash Toward Accrual* (CTA) ke Laporan Keuangan berbasis Akrual, jumlah Laporan Keuangan yang disajikan berubah dari 3 laporan menjadi 7 laporan, yaitu Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2015 telah diserahkan kepada BPK pada tanggal 17 Mei 2016, dan BPK sesuai amanat UU telah menyelesaikan laporan hasil pemeriksaannya pada tanggal 15 Juli 2016, dan dapat diserahkan pada hari ini tanggal 19 Juli 2016.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK Provinsi NTT menegaskan bahwa BPK menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam rangka perbaikan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah. Atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat TA 2015, BPK memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian (WDP)**, dengan hal yang dikecualikan sebagai berikut:

- 1) **Kas di Bendahara Pengeluaran**, yaitu terdapat sisa kas tahun 2014 dan tahun 2015 yang telah digunakan oleh bendahara dan pihak lainnya sebesar Rp82 juta untuk keperluan pribadi dan keperluan dinas yang belanjanya tidak diakui sebagai pengeluaran daerah ;
- 2) **Piutang lainnya**, yaitu terdapat piutang sebesar Rp1,14 Miliar yang berasal dari dana pemberdayaan pada Koperasi Usaha Tani (KUT) Supra Insus Tahun 2002 tidak didukung data atas pihak-pihak penerima;
- 3) **Investasi Permanen**, yaitu penyertaan modal sebesar Rp2,6 Miliar pada PDAM Sumba Barat tidak didukung dengan laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor independen;
- 4) **Aset Tetap**, antara lain terdapat selisih lebih besar Rp630 juta dan selisih kurang sebesar Rp503 juta atas nilai aset tetap yang disajikan di neraca dengan buku daftar aset tetap tingkat pengelola barang serta aset tetap senilai Rp15,52 Miliar tidak disajikan secara rinci;
- 5) **Aset Lain-lain**, terdapat aset minimal senilai Rp10,64 Miliar yang tidak diketahui keberadaannya (hilang/mati/salah catat) serta dikuasai pihak lain dan atau telah diserahkan kepada masyarakat; dan
- 6) **Penerimaan dan pengeluaran dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS)** belum disajikan dan diungkapkan memadai dalam laporan keuangan.

BPK mengharapkan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dapat meningkatkan pengelolaan keuangannya di masa mendatang dan memperoleh opini yang lebih baik, serta senantiasa menggunakan sebesar-besarnya keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

HUMAS BPK PERWAKILAN PROVINSI NTT

Informasi lebih lanjut:

Humas BPK Perwakilan Provinsi NTT
Jl. W.J. Lalamentik, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Telp.(0380) 840600, Fax. (0380) 840601, Email : humas.bpkntt@gmail.com